



Angka Maksimal Sulit Didapat

Angka tunjangan kinerja daerah bagi PNS Pemprov DKI sangat menggiurkan. Namun, jangan harap itu didapat dengan mudah tanpa kerja keras.

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan sistem tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis secara *online* atau daring (*e*-TKD). Kebijakan itu diyakini akan membuat pegawai negeri sipil (PNS) termotivasi untuk bekerja lebih keras.

Meskipun terjamin dengan adanya TKD statis, tidak serta-merta TKD dinamis bakal didapatkan dengan angka maksimal jika PNS tersebut tidak bekerja. "Saya yakin. Mereka (pegawai) harusnya berebut kerja karena TKD dinamis dinilai dari kinerja. Apa yang dilakukan hari itu. Kalau tidak *ngapa-ngapain*, ya tidak dapat (angka)," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, kemarin.

Menurutnya, TKD statis pun tidak akan didapat dengan mudah, sebab akan terkoreksi oleh tingkat kehadiran serta pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan pegawai. Saat ini pemprov terus mematangkan konsep sanksi atas pelanggaran disiplin tersebut dalam bentuk pemotongan TKD.

Ia menyebutkan, bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, TKD-nya dipotong 5%. Tidak hadir tapi dengan surat izin dipotong 3%. Bahkan tidak hadir di kantor karena sakit juga dipotong 2,5%. Selain ada pemotongan karena ketidakhadiran, beberapa pelanggaran lain juga memiliki sanksi pemotongan TKD, di antaranya melanggar larangan merokok di lingkungan Kantor Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Saefullah, pemotongan bisa dilakukan jika ada bukti PNS bersangkut merokok di lingkungan kantor. Oleh karena itu, mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut memastikan ada tim TKD yang selalu memantau kinerja serta mengawasi pengisian *e*-TKD kepala instansi dan seluruh bawahannya. Tim TKD terdiri dari petugas Inspektorat DKI, TKD Badan Kepegawaian Daerah

(BKD), serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Saefullah pun menegaskan pihaknya kini memberikan instruksi kepada Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Diskominfo) DKI untuk meningkatkan mutu sistem informasi Pemprov DKI, sebab kemampuan *time up* sistem informasi pemprov saat ini masih terbatas. Banyak PNS mengeluh kesulitan mengakses situs *e*-TKD saat ingin mengisi laporan kinerja harian.

"Saya memang tekankan kepada Diskominfo, yang harus membangun sistem yang benar. Selain indikator penilaiannya termuat dengan baik, situs itu juga bisa digunakan orang banyak, tanpa masalah lambat, lemot, dan sebagainya. Dia (Diskominfo) minta anggaran, saya bilang minta saja, pasti dikasih asalkan bisa buat sistem yang bagus," ujarnya.

Pertengahan tahun

Sementara itu, Kepala Diskominfo DKI Jakarta Ii Kurnia mengakui saat ini masih mengembangkan sistem informasi *e*-TKD. Instansi tersebut bersama BKD dan tim konsultan teknologi informasi asal Surabaya terus mengembangkan sistem sekaligus memasukkan data indikator kinerja PNS di seluruh instansi.

Ia tidak membantah sistem informasi saat ini masih lambat. Ditargetkan, pada pertengahan tahun ini, sistem itu bisa berjalan dengan baik dan dapat digunakan semua PNS.

"Kami masih mengembangkan secara bertahap karena sistem ini baru. Memang ada pengadaan untuk jasa konsultan dan perangkat baru. Kami maksimalkan pengembangannya sampai pertengahan tahun ini supaya bisa digunakan semua pegawai," tutur Ii.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan TKD dinamis telah

diberikan pada tahun lalu, tetapi penerapannya belum maksimal. Oleh karena itu, ia minta sistem pencatatan TKD tersebut dilakukan secara *online* tahun ini.

TKD dinamis diberikan setiap tiga bulan, berdasarkan kinerja yang dilakukan setiap PNS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Laporan kinerja harian tersebut dimasukkan secara *online* ke situs milik BKD DKI Jakarta yang beralamat di www.bkd-dki.jakarta.go.id. (J-2)

putrianisa@mediaindonesia.com